



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**(LAKIP)
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2024 (LAKIP Dinas Perikanan 2024)" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2024 menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Perikanan Tahun 2024. LAKIP ini menjelaskan tentang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dari berbagai sumber anggaran baik APBD Kabupaten Luwu Timur (DAU dan DAK), APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun APBN, yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdampak nyata terhadap pencapaian target indikator kinerja Kunci (IKK). Di samping itu, dalam LAKIP ini juga menguraikan tentang keselarasan antara pencapaian sasaran Renstra Dinas dan sasaran Rencana Kinerja Tahunan 2024 dengan sasaran kinerja utama RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran

tentang hasil pembangunan sektor perikanan secara umum di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran dan *stakeholder* terkait lainnya, kondisi ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur sehingga bisa lebih maju dan lebih unggul, ditengah-tengah semakin tingginya tantangan dan permasalahan, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada Tim Penyusun LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2024, yang telah berupaya bekerja keras dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas yang diamanahkan sehingga LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kami menyadari LAKIP ini masih mengandung sisi kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan hati, terbuka dan ikhlas, kami senantiasa menyambut baik atas segala bentuk kritik positif serta saran konstruktif dari semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada masa mendatang. Akhir kata, dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah SWT, semoga LAKIP Dinas Perikanan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembangunan disegala bidang.

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS

Drs. Alimuddin Nasir, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 1961231 198603 1 134



IKHTISAR EKSEKUTIF

Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pelayanan terhadap kelompok nelayan, petani tambak, dan masyarakat pesisir pada umumnya diwujudkan dengan pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021. Adapun **Visi** Dinas Perikanan sejalan dengan **Visi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu **Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**.

Berkaitan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, wajib melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Realisasi pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan pada pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 yang secara khusus dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan

Indikator Kinerja 1 : Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan

Indikator Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, yang sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik, namun data untuk tahun 2024 belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah data capaian tahun 2024.

Sasaran ke-1: Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan dapat terwujud seiring dengan pencapaian indikator sasaran yaitu Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Jumlah Produksi Perikanan dengan persentase capaian rata-rata di atas 100 persen atau kategori **sangat berhasil**.

Sasaran ke-2: Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah dimana indikator sasaran yang ingin dicapai

yaitu Nilai SAKIP, dimana target untuk tahun 2024 adalah nilai BB dan capaian yaitu nilai BB, dengan kategori penilaian **sangat berhasil**.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 untuk semua sasaran berikut indikator kerjanya secara umum berhasil. Ada beberapa indikator yang belum terealisasi atau masih dibawah target, namun secara keseluruhan capaian rata-rata kegiatan cukup baik atau memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka pencapaian sasaran tahun 2024 lebih baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS

Drs. Alimuddin Nasir, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19651231 198603 1 134



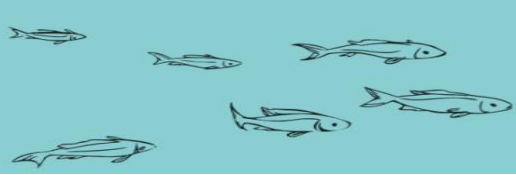
DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Diagram	xi
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat	2
1. Maksud.....	2
2. Tujuan	2
3. Manfaat	2
I.3 Gambaran Umum Daerah	3
1. Luas dan Batas Wilayah Geografis	3
2. Potensi Perikanan	3
3. Gambaran Umum Dinas Perikanan	9
I.4 Peran Organisasi	11
I.5 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
II.1 Perencanaan Strategis	13
1. Visi dan Misi.....	13
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	14
3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 (IKU RPJMD)	15
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	20
III.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	21
1. Capaian Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Utama RPJMD).....	21
2. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah di Lakukan	29
3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
4. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.....	35
III.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2024.....	67
1. Realisasi Keuangan	67
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
3. Analisa penyebab peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	70
III.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi dan Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu	72
BAB IV PENUTUP	73
IV.1 Kesimpulan	73
IV. 2 Saran	74
Lampiran	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.....	14
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.....	15
Tabel 2.3.	Perjanjian Kerja Eselon II.....	16
Tabel 2.4.	Perjanjian Kerja Eselon III Sekretaris.....	16
Tabel 2.5.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Tangkap.....	16
Tabel 2.6.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Budidaya.....	17
Tabel 2.7.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan.....	17
Tabel 2.8.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	17
Tabel 2.9.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	18
Tabel 2.10.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan.....	19
Tabel 2.11.	Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur T.A. 2024	19
Tabel 3.1.	Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II.....	22
Tabel 3.2.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2024	23
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Juta Rupiah) Tahun 2021-2024	23
Tabel 3.4.	Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Target Renstra Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	24
Tabel 3.5.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.6.	Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2021-2024.....	25
Tabel 3.7.	Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Target Renstra Produksi Perikanan.....	26
Tabel 3.8.	Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Standar Provinsi dan Nasional Produksi Perikanan Tahun 2024.....	27
Tabel 3.9.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai LAKIP Tahun 2024.....	28
Tabel 3.10.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LAKIP Tahun 2021-2024.....	28
Tabel 3.11.	Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Target Renstra	28

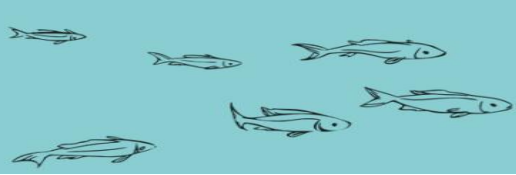
	Nilai LAKIP.....	
Tabel 3.12.	Sarana dan Peralatan Kerja Utama	34
Tabel 3.13.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Perairan Laut dan Danau) Tahun 2024.....	35
Tabel 3.14.	Data Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang Dibangun sampai Tahun 2024.....	37
Tabel 3.15.	Data Tambatan Perahu yang Dibangun/Rehab Tahun 2024 ..	38
Tabel 3.16.	Data Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Tahun 2024.....	39
Tabel 3.17.	Program Prioritas (KP 1) Pemberian Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Bagi Nelayan.....	41
Tabel 3.18.	Data Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Aktif Tahun 2024.....	43
Tabel 3.19.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024.....	44
Tabel 3.20.	Data Prasarana Pembudidayaan Ikan yang Dibangun/Rehab Tahun 2024	48
Tabel 3.21.	Program Prioritas (KP 1) Pemberian Benih Unggul serta Sarana dan Penunjangnya (Jalan Produksi Tambak yang Dibangun/Ditingkatkan) Tahun 2022-2024.....	49
Tabel 3.22.	Program Prioritas (KP 1) Pemberian Benih Unggul serta Sarana dan Penunjangnya (Jembatan Tambak yang Dibangun) Tahun 2022-2024	49
Tabel 3.23.	Data Sarana Pembudidayaan Ikan Tahun 2024	50
Tabel 3.24.	Program Prioritas (KP 1) Pemberian Benih Unggul serta Sarana dan Penunjangnya (Benih Unggul serta Sarana Pembudidayaan Ikan yang Tersedia) Tahun 2022-2024	52
Tabel 3.25.	Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Ikan Tahun 2024	54
Tabel 3.26.	Data Kelompok yang Melakukan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (RTP) Tahun 2024	54
Tabel 3.27.	Data Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Tahun 2024	57
Tabel 3.28.	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024	67
Tabel 3.29.	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024	68
Tabel 3.30.	Target dan Realisasi Program Berdasarkan Dokumen Perubahan Tahun 2024	69
Tabel 3.31.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	70
Tabel 3.32.	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Lakip Tahun 2023	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan 10





DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2021-2024	24
Diagram 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2020-2024	26



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Perikanan
Tahun 2024 |
| Lampiran 2 | Dokumentasi Kegiatan |



Bab 1

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) merupakan amanat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu asas dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa laporan yang diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas dan subyektif mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan serta indikator makro, baik pada aspek keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

I.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja daerah yang sudah diperjanjikan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat dan obyektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2024, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan.
- Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas instansi serta meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.
- Sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi dinas untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

3. Manfaat

Manfaat penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja pada periode yang akan datang;
- c. Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya;
- d. Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang agroindustri dan ketahanan pangan.

I.3 GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Luas dan Batas Wilayah Geografis

Kabupaten Luwu Timur, memiliki luas wilayah 6.994,88 km² atau 11,14 % luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan dan terdapat 127 Desa/Kelurahan. Secara geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2°03'00" - 3°03'25" LS dan 119°28'56" - 121°47'27" BT. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

2. Potensi Perikanan

Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Jenis komoditi yang dapat dikembangkan merupakan komoditi ekspor dengan potensi produksi skala besar. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan produksi yang sangat luas dan layak serta dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai yang terdiri dari:

- ❖ Panjang garis pantai : 117,4 Km
- ❖ Luas perairan otonomi : 48.050 Km²
- ❖ Luas Tambak : 12.061,89 Ha

- ❖ Luas Budidaya Rumput Laut : 1.961,50 Ha
- ❖ Luas Budidaya Air Tawar : 590 Ha

Potensi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu Timur secara umum mencakup Potensi Perikanan Tangkap dan Potensi Perikanan Budidaya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan letak geografis Kabupaten Luwu timur yang terdiri dari wilayah laut dan darat dengan 9 (sembilan) sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur melintasi kecamatan. Sungai terpanjang yaitu Sungai Kalaena dengan panjang 85 Km dan yang terpendek Sungai Bambalu dengan panjang 15 Km. Selain itu terdapat 5 (lima) danau alami yang sangat indah dan dipertahankan kealamiannya yaitu Danau Matano (dengan luas 245,70 km²), Danau Mahalona (25 km²), Danau Towuti (585 km²), Danau Taparang Masapi (2,43 km²) dan Danau Lontoa (1,71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan 4 (empat) danau lainnya tersebar di Kecamatan Towuti. Berikut perkembangan perikanan di Kabupaten Luwu Timur :

a. Potensi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan salah satu potensi investasi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan potensi lahan yang layak untuk budidaya sangat luas. Tingkat pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditi perikanan budidaya sampai dengan saat ini belum mencapai 30 % dari potensi lahan yang dapat dikembangkan sehingga target produksi yang dicapai pun masih sangat rendah dari potensi produksi yang dapat dicapai.

Adapun potensi perikanan budidaya Kabupaten Luwu Timur secara umum meliputi :

✚ Potensi Perikanan Budidaya di Air Laut

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi kawasan budidaya laut yang cukup besar di wilayah perairan teluk

Bone, dengan garis pantai 117,4 km sepanjang pesisir Kec. Burau, Wotu, Angkona dan Malili. Kondisi perairan laut yang masih alami dan tidak mengalami pencemaran merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pengembangan potensi budidaya laut di wilayah ini. Komoditi unggulan yang dapat dikembangkan antara lain :

1) Komoditi Teripang dan Lobster

Teripang dan Lobster sebagai salah satu komoditi ekspor di Kabupaten Luwu Timur belum dikelola dengan baik oleh para nelayan di Kabupaten Luwu Timur karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik penangkapan maupun budidaya Lobster Laut. Untuk itu, perlu menjaga kelestarian ekosistem teripang dan lobster di Bumi Batara Guru dari aktivitas penangkapan secara besar-besaran dan tidak bertanggungjawab.



2) Komoditi Rumput Laut *Euchema Cottonii*

Budidaya rumput laut *Euchema Cottonii* merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan di kawasan perairan Teluk Bone sepanjang pantai pesisir Kabupaten Luwu Timur khususnya di perairan Kec. Burau sampai pantai Wotu. Luas Lahan untuk pengembangan rumput laut *Euchema Cottonii* di Bumi Batara guru mencapai **1.961,5 Ha** dengan kisaran produksi **212.391,26 ton kering per tahun** dengan asumsi asumsi produktivitas rata-rata **15.000 Kg/Ha kering**.



✚ Potensi Perikanan Budidaya Air Payau

Produksi perikanan budidaya air payau atau tambak di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan tambak untuk budidaya yang cukup luas mencapai 12.061,89 Ha.

1) Komoditi Rumput Laut *Gracillaria* sp

Komoditi Rumput laut *Gracillaria* sp merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang telah berhasil dikembangkan dan dibudidayakan. Potensi Pengembangan Rumput Laut *Gracillaria* sp di Bumi Batara Guru didukung dengan ketersediaan lahan yang layak untuk budidaya seluas 11.681,89 **Ha** dengan kisaran produksi mencapai **156.026,57 ton kering per tahun** dengan asumsi produktivitas rata-rata **4.000 kg/Ha kering**.



2) Komoditi Ikan Bandeng

Ikan Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang saat ini menempati peringkat terbaik di Propinsi Sulawesi Selatan. Komoditi ini dibudidayakan pada 4 (empat) wilayah kecamatan pesisir untuk memenuhi kebutuhan domestik dan daerah lainnya

baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Potensi Pengembangan Ikan Bandeng di Bumi Batara Guru didukung dengan ketersediaan lahan yang layak untuk budidaya seluas **12.061,89 Ha** dengan kisaran produksi mencapai **14.644,6 ton per tahun** pada tingkat produktivitas rata-rata **1.214 kg/Ha**.



3) Komoditi Udang Windu/Vanamae

Udang merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan oleh masyarakat dengan potensi usaha yang cukup baik serta segmentasi pasar yang sangat tinggi. Secara umum jenis udang yang paling banyak dikembangkan oleh para pembudidaya adalah Udang Windu dan Udang Vanamae. Terdapat juga udang laci-laci dan udang Galah.

Luas lahan untuk pengembangan budidaya udang di Bumi Batara Guru mencapai **12.061,89 Ha** dengan kisaran produksi sebesar **3.391,01 ton/tahun** pada tingkat produktivitas **750 kg/Ha**.



Budidaya Air Tawar

Potensi pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur secara umum dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan. Hal ini didukung dengan ketersediaan air yang melimpah dan layak bersumber dari sungai, irigasi dan danau. Potensi lahan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Kolam Air Tawar

Budidaya ikan dengan kolam air tawar merupakan salah satu metode budidaya yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur di seluruh kecamatan. Komoditi ikan yang umum dikembangkan adalah Ikan Lele, Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Gurami dan Ikan Bawal yang dibudidayakan untuk menyuplai kebutuhan domestik maupun kebutuhan luar daerah.



b. Potensi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Luwu Timur cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam dan luar daerah. Adapun potensi perikanan tangkap yang dominan berasal dari jenis ikan pelagis kecil seperti tembang, teri, kembung, dll. Lokasi perikanan tangkap tersebar di 4 (empat) kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Malili, Angkona, Wotu dan Bura. Komoditas yang dihasilkan dari aktifitas penangkapan antara lain cakalang, tuna, tenggiri, layang, kembung, kerapu, cucut, teri, kepiting, kakap, bawal, baronang dan jenis ikan lainnya yang setiap musim dapat menghasilkan

produksi yang cukup tinggi. Data Perikanan Tangkap Tahun 2024 menunjukkan:

- 1) Jumlah RTP Nelayan 1.982 RTP
- 2) Jumlah Alat tangkap terdiri dari Jaring Insang, Pukat Tarik/Pukat Pantai, Pancing Tonda, Bagang Apung, Purse Seine dan Rawai Dasar, Sero, Rakkang/Perangkap, Bubu, Payang, dan Anco.
- 3) Jenis Ikan yang tertangkap :
 - Pelagis besar: Tongkol, Cakalang, dan Tenggiri
 - Pelagis kecil : Layang, Kembung, Teri, dan Belanak
 - Demersal : Cucut, Kerapu, Kakap, Bawal dan Baronang
- 4) Armada :
 - ✓ Perahu tanpa motor : 37 unit
 - ✓ Perahu bermotor : 1.920 unit
 - ✓ Kapal Motor : 57 unit



3. Gambaran Umum Dinas Perikanan

Susunan Organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat yang didukung oleh dua sub bagian yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Perikanan Budidaya yang didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Perikanan Tangkap didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur hingga akhir tahun anggaran 2024 sebanyak 28 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- 1) Pejabat Struktural berjumlah 8 Orang dengan rincian :
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 3 orang
- 2) Staf berjumlah 13 orang dengan rincian :
 - Golongan IV : 1 Orang
 - Golongan III : 7 Orang
 - Golongan II : 1 Orang
 - PPPK : 4 Orang
- 3) Fungsional berjumlah 7 Orang

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan



I.4 PERAN ORGANISASI

Tugas Pokok Dinas Perikanan secara umum berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 yakni membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

I.5 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan Perikanan selama ini banyak dipengaruhi oleh globalisasi baik dari aspek ekonomi global maupun isu dunia tentang lingkungan, maka dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- a. Permintaan pasar dunia akan komoditi perikanan lebih diutamakan dari komoditi budidaya, hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan sumberdaya;
- b. Komoditi hasil perikanan tangkap sangat ketat terutama dari cara/metode, teknik dan alat yang digunakan karena hal ini dipantau oleh Uni Eropa;

- c. Menurunnya kualitas sumberdaya perikanan sebagai akibat dari *Illegal fishing* dan meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan hunian dan lahan usaha;
- d. Sarana dan prasarana budidaya khususnya budidaya air payau dan laut relative masih terbatas, demikian juga dengan usaha penangkapan ikan sehingga produksi dan produktivitas masih terbatas;
- e. Pasca panen hasil perikanan belum dikelola secara optimal; dan
- f. Belum adanya penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sehingga masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara pembangunan ekonomi atau manufaktur dengan pembangunan perikanan.

Tantangan utama pembangunan sektor perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah Mewujudkan Target Kinerja RPJMD 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan Kegiatan Prioritas (KP 1) yaitu :

1. Pemberian benih unggul serta sarana dan penunjangnya
 - Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia 100 Kelompok
 - Jumlah Jembatan tambak yang dibangun 15 Unit
 - Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun 20 Km
2. Pemberian sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan (75 Kelompok)
3. Pemberian bantuan peralatan pengolahan perikanan (25 Kelompok)

Bab II

Perencanaan Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan actual/kekinian dari masyarakat sasaran, yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan factor kekuatan, tantangan, hambatan serta peluang yang membentangi di depan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perikanan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Rencana strategis tersebut dimaksudkan untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran perencanaan tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.

Adapun **Visi** Dinas Perikanan sejalan dengan Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu **Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya.**

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi. Adapun tujuan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 :
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1. Peningkatan jumlah armada/kapal penangkap ikan; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap; 3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan; 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan; 5. Pembinaan nelayan, petani ikan dan pengusaha perikanan; 6. Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kab. Luwu Timur; 7. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan 8. Pembinaan SPDN.
			2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI); 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana budidaya perikanan; 3. Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan; 4. Peningkatan akses informasi dan teknologi perikanan; 5. Penyediaan data kelautan dan perikanan; dan 6. Pengembangan budidaya percontohan air tawar dan air payau.

			3. Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta perbaikan mutu dan daya saing produk perikanan	1. Peningkatan sarana prasarana unit pengolahan ikan (UPI); 2. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan; 3. Peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; 4. Peningkatan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan; dan 5. Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan.
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART

3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 (IKU RPJMD)

Indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Tahun 2024 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 :
Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Penjelasan Perhitungan	Satuan	Target 2024
1	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha yang dirilis oleh BPS	Juta Rupiah	675.323
2	Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Tangkap ditambahkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama setahun	Ton	389.370

II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20234

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan target indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja ini diharapkan terwujud komitmen antara pemberi amanah (Bupati) dengan penerima amanah (Kepala Dinas) dan kesepakatan

antara pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Lampiran : Perjanjian kinerja eselon II

Tabel 2.3 : Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	675.323 Juta Rupiah
		Produksi Perikanan	389.370 Ton
II	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Nilai Lakip	81

Tabel 2.4 : Perjanjian Kerja Eselon III Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah	Tingkat kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	100 Persen
II	Tertib administrasi keuangan	Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen
III	Kualitas pengelolaan aset	Persentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100 Persen
IV	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90%	100 Persen
V	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 Persen
VI	Kualitas monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 Persen
		Persentase hasil monitorin dan evaluasi	100 Persen

**Tabel 2.5 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Perikanan Tangkap**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	10.267 Ton
II	Meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	96 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100 Persen

	Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan		
IV	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100 Persen
V	Tersedianya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	86 Persen
VI	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100 Persen

**Tabel 2.6 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Perikanan Budidaya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	378.997 Ton
II	Terpenuhinya pemberdayaan kepada seluruh Pembudidaya ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	100 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100 Persen

**Tabel 2.7 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produksi hasil pengolahan ikan	Produksi hasil pengolahan ikan	565 Ton
II	Meningkatnya Pengelolaan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen
III		Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	83 Persen
IV		Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	73 Persen

**Tabel 2.8 : Perjanjian Kerja Eselon IV
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya penyusunan perencanaan Dinas	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen
II	Terwujudnya Rencana Kerja	Jumlah Dokumen RKA-	4 Dokumen

	Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah	SKPD, DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, DPA-SKPD	
III	Terpenuhinya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
IV	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang
V	Terpenuhinya bahan dan menyusun laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD	18 Laporan

**Tabel 2.9 : Perjanjian Kerja Eselon IV
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Gedung, Bangunan Kantor lainnya, Kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Peralatan dan mesin yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya	67 Unit
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
II	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
III	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
IV	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Laporan
V	Terwujudnya pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
VI	Meningkatnya Kompetensi, disiplin,	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	8 Orang

	dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	peraturan perundang-undangan	
VII	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	4 Paket
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen
		Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan

**Tabel 2.10 : Perjanjian Kerja Eselon IV
Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1.000 Ha

Program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk tahun 2024 yang disajikan pada tabel di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Format Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjelaskan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Total anggaran untuk membiayai pelaksanaan RKT Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.11 : Anggaran Belanja Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu Timur T.A. 2024**

No	Jenis Anggaran Belanja	Target (Rp)
1	BELANJA OPERASI	22.287.067.700
1 01	Belanja Pegawai	3.548.728.450
1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.738.339.250
1 05	Belanja Hibah	-
2	BELANJA MODAL	4.493.240.000
2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	842.050.000
2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.251.390.000
2 04	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi	1.399.800.000
	JUMLAH	26.780.307.700



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendorong terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama sasaran strategis (IKU Renstra) yang tertuang dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja dan capaian target indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan realiasi tolak ukur kinerja dengan target indikator kinerja kegiatan yang meliputi : *input*, *output*, dan *outcome*. Sedangkan pencapaian indikator program dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target realisasi indikator program. Instrumen pengukuran kinerja yang digunakan terdiri dari :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 2) Penetapan Kinerja (PK);
- 3) Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK);
- 4) Pengukuran Pencapaian Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (*input*, *output* dan *outcome*); dan
- 5) Analisis Efisiensi dan Efektifitas;

III.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

1. Capaian Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Utama RPJMD)

Hasil Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Perikanan dengan Bupati Luwu Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran, diperoleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-------------------|
| $x \geq 85$ | : Sangat Berhasil |
| $70 \leq x < 85$ | : Berhasil |
| $55 \leq x < 70$ | : Cukup Berhasil |

$x < 55$: Kurang berhasil

Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 :
Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Juta Rupiah)	675.323	*658.624	97,52	Sangat Berhasil
		Produksi Perikanan (Ton)	389.370	396.094,96	101,72	Sangat Berhasil
II	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Nilai Lakip (Angka)	81	*77,25	95,37	Sangat Berhasil

Secara umum Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran utama dan 1 (satu) sasaran pendukung yang ditetapkan, rata-rata capaian di atas 100% sehingga dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

Capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. SASARAN 1 : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan

Indikator Kinerja 1 : Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan

Definisi operasional nilai PDRB sub sektor perikanan adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa sektor perikanan yang diproduksi dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 (satu) tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Indikator kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dihitung menggunakan formulasi nilai PDRB sub sektor perikanan atas dasar harga konstan menurun lapangan usaha, yang sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik, namun data untuk tahun 2024 belum terbit sehingga data yang digunakan adalah data capaian tahun 2023.

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2024 sebesar 97,52 persen, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 :
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	675.323	*658.624	97,52 %
Persentase Capaian Rata-Rata			97,52%

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya penurunan harga salah satu komoditi perikanan yaitu ikan bandeng sehingga nilai tambah barang dan jasa menjadi berkurang.

2) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Juta Rupiah) Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	635.189,74	661.796,08	658.624	*658.624

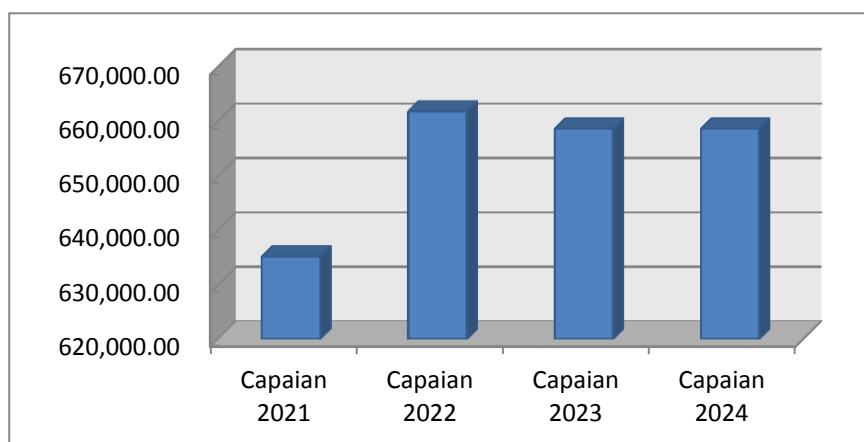


Diagram 3.1 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2021-2024

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 1 (satu) Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dari tahun 2021 sampai tahun 2024 menunjukkan peningkatan meskipun ditahun 2021 mengalami penurunan. Salah satu pemicu sehingga Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan meningkat karena adanya peran serta Pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat bantu penangkapan ikan yang salurkan kemasyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan sangat menjanjikan baik itu budidaya air payau maupun air tawar

3) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada table berikut:

Tabel 3.4 :
Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Target Renstra Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	*658.624	685.356	695.389

Indikator Kinerja 2 : Produksi Perikanan

Definisi operasional Produksi Perikanan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan. Indikator kinerja produksi perikanan dihitung dengan formulasi jumlah produksi perikanan tangkap ditambahkan jumlah produksi perikanan budidaya.

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian produksi perikanan pada tahun 2024 melebihi dari target produksi yang akan dicapai sebesar 101,72 persen, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 :
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Produksi Perikanan (Ton)	389.370	396.094,96	101,72 %
Persentase Capaian Rata-Rata			101,72%

Berdasarkan tabel di atas, jumlah produksi perikanan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi dari segi budidaya perikanan terutama pada komoditi rumput laut jenis cottoni sehingga terjadi peningkatan produksi.

2) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 :
Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Produksi Perikanan (Ton)	325.622	329.212,09	389.369,70	396.094,96

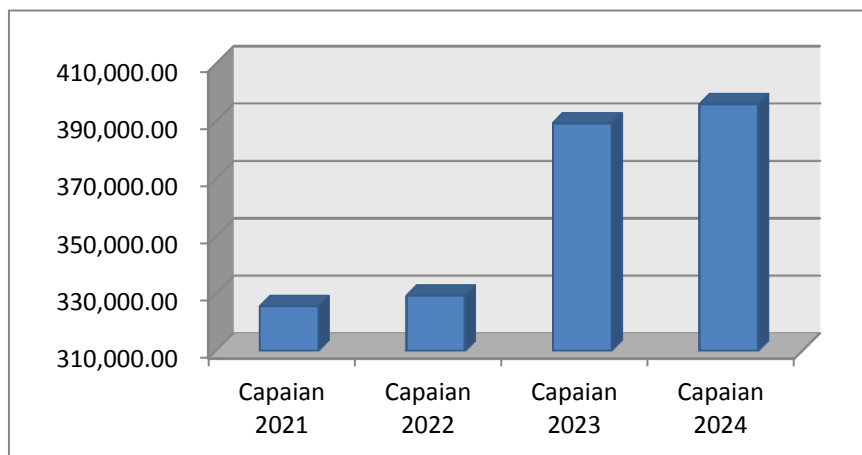


Diagram 3.2 :

Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2021-2024

Pada diagram di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 2 (dua) Jumlah Produksi Perikanan dari tahun 2021 sampai tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu pemicu sehingga hasil perikanan tangkap dapat meningkat karena adanya peran serta pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat bantu penangkapan ikan yang disalurkan kemasyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan akan sangat menjanjikan baik itu budidaya air payau maupun air tawar.

3) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada table berikut:

Tabel 3.7 :
Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Target Renstra Produksi Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
Produksi Perikanan (Ton)	396.094,96	326.433	326.734

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan standard nasional digambarkan pada table berikut:

Tabel 3.8 :
Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Standar Provinsi dan Nasional Produksi Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Provinsi	Standar Nasional
Produksi Perikanan (Ton)	396.094,96	1.316.708	6.660.000

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 30,08 % terhadap target pencapaian produksi perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk pencapaian target nasional, Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 5,94%.

b. SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja 3 : Nilai LAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggung jawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indicator kinerja Nilai LAKIP menggunakan rumus N-1 dimana yang dimasukkan adalah capaian tahun 2023. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan nilai 77,25.

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian antara target dan realisasi kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 :
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai LAKIP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai LAKIP	81	77,25	95,37 %
Persentase Capaian Rata-Rata			95,37 %

2) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LAKIP Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Nilai LAKIP	71,39	75.95	77,25	77,25

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Nilai LAKIP menunjukkan peningkatan. Hal ini dipicu oleh adanya kerjasama antar *stakeholder* di dalam lingkup Dinas Perikanan yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.

3) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada table berikut:

Tabel 3.11 :
Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Target Renstra Nilai LAKIP

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
Nilai LAKIP	77,25	81	91

2. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah di Lakukan

a. Faktor Pendorong

Beberapa factor pendorong tercapainya sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah:

- 1) Kebijakan pelaksanaan penertiban rumpon terapung skala besar dan aktif di mulut Teluk bone sejak tahun 2016 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berdampak pada pola migrasi ikan yang sudah mulai normal kembali hingga ke perairan Luwu Timur;
- 2) Kesesuaian akan kebutuhan kelompok Nelayan dalam hal sarana dan prasarana penangkapan ikan yang meningkatkan hasil penangkapan ikan;
- 3) Diversifikasi jenis alat tangkap yang digunakan oleh kelompok nelayan sehingga meningkatkan efektifitas dan produksi hasil penangkapan dan berdampak pada terjaganya kelestarian sumberdaya ikan;
- 4) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mendorong peningkatan produksi hasil tangkapan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan melalui bantuan sarana prasarana penangkapan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan termasuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan;
- 5) Dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan pada nelayan yang mengarah pada pengetahuan penangkapan ikan yang terampil dengan dibekali pengetahuan teknik keselamatan kerja sehingga disamping mampu meningkatkan hasil tangkapan juga dapat meminimalisir kecelakaan kerja;

- 6) Pendampingan yang dilakukan kepada kelompok nelayan yang persuasive sehingga factor pembatas serta kendala yang dihadapi oleh nelayan dapat sesegera mungkin diatasi
- 7) Adanya pendampingan teknologi kepada kelompok tani pembudidaya (54 kelompok), sehingga terjadi transfer teknologi kepada petani pembudidaya dan mereka dapat melakukan pembudidayaan ikan dengan baik sesuai dengan standar CBIB;
- 8) Adanya bantuan sarana budidaya ikan kepada kelompok tani (30 kelompok) seperti sarana ikan Lele, Nila, rumput laut, sehingga kelompok tani dapat meningkatkan volume usaha budidaya nya;
- 9) Adanya pembinaan terhadap usaha perbenihan rakyat (UPR), sehingga akses pemenuhan kebutuhan benih ikan air tawar yang unggul terpenuhi;
- 10) Adanya bantuan prasarana budidaya ikan seperti pembangunan jalan produksi dan jembatan tambak sehingga meningkatkan kelancaran mobilitas sarana produksi dan hasil budidaya kelompok tani;
- 11) Adanya sosialisasi tentang pengendalian hama dan penyakit ikan kepada kelompok tani pembudidaya ikan (30 orang), sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko gagal panen;
- 12) Adanya pendampingan teknologi kepada kelompok tani pengolah hasil perikanan, sehingga terjadi transfer teknologi kepada pengolah hasil perikanan mereka dapat melakukan pengolahan hasil perikanan dengan baik;
- 13) Adanya pembinaan terhadap pengusaha pengolahan hasil perikanan, sehingga akses pemenuhan kebutuhan akan bahan olahan yang baik dapat terpenuhi; dan
- 14) Adanya sosialisasi manajemen pengelolaan usaha rumah tangga oleh Dinas terkait.

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih adanya masyarakat pesisir dan nelayan yang terlibat melakukan *illegal fishing* (pemboman, pembiusan, pemberian bahan kimia dll) yang mengancam kelestarian sumberdaya ikan;
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menjaga ekosistem lingkungan, sehingga masyarakat nelayan masuk golongan masyarakat yang turut serta dalam menyumbang terhadap pencemaran lingkungan pesisir dan perairan;
- 3) Kebijakan tentang status Badan Hukum bagi kelompok nelayan yang dipersyaratkan, disatu sisi sementara memantapkan kedudukan status dan ketepatan profesi nelayan, namun disisi lain semakin panjang lama dalam pengurusan penerbitan badan hokum kelompok;
- 4) Dibatasinya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya meningkatkan kualitas baik lingkungan maupun wilayah penangkapan ikan;
- 5) Adanya hama dan penyakit ikan yang masih sering terjadi dalam usaha budidaya;
- 6) Kurangnya kerjasama antara petani pembudidaya ikan dalam usaha pembudidayaan ikan yang berwawasan lingkungan (penanganan kualitas air dan kualitas tanah);
- 7) Adanya sarana jalan yang belum memadai, karena terhambat oleh adanya lokasi yang masih daerah hutan lindung serta adanya jalan produksi yang sudah lama dibangun dan telah mengalami kerusakan yang parah;
- 8) Ketersediaan pupuk yang masih belum mencukupi kebutuhan petani pembudidaya;
- 9) Adanya program Gubernur Sulawesi Selatan yang tidak masuk dalam program kegiatan Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur dalam RPJMD, yaitu Program Kebangkitan Udang;

- 10) Pengelohan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal;
- 11) Rendahnya mutu dan daya saing produk hasil perikanan;
- 12) Pemasaran komoditi hasil perikanan; dan
- 13) Keterbatasan jumlah aparatur ASN di Dinas Perikanan

c. Alternatif Solusi

- 1) Sosialisai dan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian dari tindakan *illegal fishing* harus terus dilakukan kepada masyarakat pesisir dan Nelayan;
- 2) Perlu kebijakan pelimpahan kewenangan dalam hal pengurusan pembentukan Badan Hukum untuk kelompok Nelayan, cukup dilakukan di tingkat Daerah;
- 3) Dukungan kegiatan baik fisik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan terutama pesisir dan pantai ke arah laut yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga wilayah yang membutuhkan sarana prasarana dalam rangka kemudahan masyarakat dan Nelayan dalam beraktifitas dapat direalisasikan dengan cepat, sehingga dapat berimbas pada peningkatan hasil tangkapan Nelayan;
- 4) Penambahan personil tenaga pendamping diperlukan dalam rangka merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- 5) Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini penentu kebijakan dalam memberikan ruang serta kebijakan anggaran terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan terkhusus pada Bidang Perikanan Tangkap dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nelayan;

- 6) Diperlukan adanya pendampingan teknologi kepada kelompok tani pembudidaya ikan secara terus menerus dan lebih intensif, sehingga terjadi transfer teknologi yang *up to date* (teknologi budidaya terkini) kepada kelompok tani pembudidaya ikan;
- 7) Diperlukan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pengendalian penyakit ikan serta teknik budidaya ikan berwawasan lingkungan dengan menghadirkan pakar dari lembaga riset dan/atau balai budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pengelolaan manajemen usaha pengolahan hasil perikanan dan teknik pengolahan hasil perikanan berwawasan lingkungan dengan menghadirkan pakar dari lembaga riset;
- 8) Diperlukan peningkatan jalan produksi yang telah dibangun dengan pengerasan jalan atau pengkerikilan;
- 9) Diperlukan penambahan kuota pupuk untuk budidaya tambak dan sosialisasi penggunaan pupuk organik kepada kelompok tani pembudidaya ikan;
- 10) Diperlukan kegiatan percontohan budidaya udang Windu;
- 11) Diperlukan studi banding terhadap petani pembudidaya ikan ke daerah yang berhasil melakukan pembudidayaan ikan dan pengusaha pengolahan hasil perikanan ke daerah yang berhasil melakukan pemasaran secara modern.
- 12) Untuk mendukung program kerja Gubernur Sulawesi Selatan, diperlukan revisi RPJMD dengan memasukkan program kebangkitan udang Windu atau memasukkan Kegiatan percontohan budidaya Udang Windu setiap tahun;
- 13) Diperlukan adanya pendampingan teknologi kepada kelompok tani pengolahan hasil perikanan berbasis kearifan local dan sumberdaya alam;

- 14) Diperlukan tambahan ASN di bidang Perikanan Budidaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengembangan usaha perikanan budidaya;
- 15) Melaksanakan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- 16) Melaksanakan pembinaan kelompok pemasaran hasil perikanan dan pelaksanaan kegiatan pameran dan expo produk perikanan dan pangan.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Aparatur

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur di akhir tahun 2024 terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 1 orang Kepala UPTD, 7 orang Fungsional, 8 orang Staf, 4 orang PPPK, serta 30 orang Tenaga Upah Jasa.

b. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Penunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dengan sarana dan peralatan kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12 :
Sarana dan Peralatan Kerja Utama

No	Jenis & Nama Sarana Peralatan Kerja	Jumlah/Satuan
1.	Kendaraan roda dua	18 unit
2.	Kendaraan roda empat	2 unit
3.	Speed boat	1 unit
4.	Laptop	25 unit
5.	Komputer PC	4 unit
6.	Balai pertemuan	3 unit
7.	PPI/TPI/Tambatan Perahu	7 unit
8.	Radio / HT	5 unit
9.	SPDN	1 unit
10.	Kios PPI	1 unit
11.	BBI	2 unit
13.	Gudang rumput laut	1 unit
14.	Pabrik es	2 unit
15.	Pabrik rumput laut	2 unit
16.	Bangsai pengolahan ikan	1 unit
17.	Gedung Dinas/Kantor PPI	1 Unit

No	Jenis & Nama Sarana Peralatan Kerja	Jumlah/Satuan
18.	Kantin Koperasi	1 Unit

4. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, maka ada 5 Program, 18 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap tahun anggaran 2024 sebesar Rp12.427.617.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.563.903.661,32 atau 93,05 %. Indikator program adalah jumlah produksi perikanan tangkap dengan target kinerja 10.267 ton dan terealisasi sebesar 10.481,44 ton atau 102,08 %. Data jumlah produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13 :
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Perairan Laut dan Danau) Tahun 2024

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi
1	Ikan Baronang	310,12
2	Balanak	290,32
3	Cakalang (SKj)	541,26
4	Cumi Cumi	106,67
5	gerot-gerot	2,26
6	Kakap merah	27,40
7	kakap putih	375,70
8	Kembung/laying	2799,21
9	kepiting bakau	347,43
10	kerapu karang	243,26
11	kerapu lumpur	21,78
12	kerapu sunu	26,61
13	kerong2	325,61
14	Kurisi	165,49
15	Kuwe	453,47
16	pari kekeh	87,13
17	Peperek	324,41
18	tembang/IPKL/Selar	2083,66
19	Tenggiri	3,50
20	teri nasi	742,63
21	Tongkol	888,26
22	udang jerbung	33,77
23	Bilih	99,09
24	Gabus/lainx	15,46

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi
25	Mas	6,71
26	Mujair	55,09
27	Nila	99,86
28	Parang	5,29
Total		10.481,44

Kegiatan

1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp12.145.712.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.357.151.254,57 atau 93,50 Persen. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap dengan target kinerja 100 Persen dan terealisasi 98,77 Persen. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan pesisir pantai yaitu Kec. Malili, Kec. Angkona, Kec. Wotu dan Kec. Burau serta satu wilayah pesisir danau yaitu Kec. Towuti. Pada Tahun 2024 sarana prasarana perikanan tangkap yang disediakan berjumlah 77 Paket yang terdiri dari 8 unit Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (tambatan perahu) dan 69 Paket Sarana Usaha Perikanan Tangkap namun ada 1 unit yang tidak terlaksana, sehingga yang terealisasi sebanyak 76 unit.

2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp215.905.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp145.232.237 atau 67,27 Persen. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan dengan target kinerja 100 Persen dan terealisasi 100 Persen. Pada tahun 2024 jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan berjumlah 32 kelompok sesuai dengan target yaitu 32 kelompok.

3) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 66.000.000 dan terealisasi sebesar Rp61.520.169,75 atau 95,73 Persen. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar dengan target kinerja 86 Persen dan terealisasi 87,50 Persen.

Tabel 3.14:
Data Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang Dibangun sampai Tahun 2024

No	TPI di Kabupaten Luwu Timur	Keterangan
1	TPI Wewangriu	Beroperasi
2	TPI Malili	Tidak beroperasi karena adanya TPI Wewangriu sehingga hanya menjadi tambatan perahu
3	TPI Ussu	Beroperasi
4	TPI Atue	Beroperasi
5	TPI Lakawali	Beroperasi
6	TPI Wotu I	Beroperasi
7	TPI Wotu II	Beroperasi
8	TPI Bahari	Beroperasi

Berdasarkan tabel di atas terdapat 8 unit TPI yang telah dibangun. Dimana 1 unit TPI sudah tidak beroperasi karena beralih fungsi sedangkan 7 unit lainnya masih beroperasi atau sebesar 87,50 Persen dari total TPI yang telah dibangun.

Sub Kegiatan

1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp79.922.500 dan teralisasi sebesar Rp 44.622.600 atau 55,83 %. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya belanja perjalanan dinas yang tidak terpakai disebabkan rata-rata pertemuan dilaksanakan secara *daring* (*zoom meeting*). Keluaran Sub kegiatan ini

adalah jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/Kota yang tersedia dengan target kinerja 4 Dokumen dan terealisasi 4 Dokumen atau sebesar 100 %.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp1.780.490.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.432.338.086,57 atau 80,44 %. Keluaran Sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia, dengan target kinerja 8 Unit dan terealisasi 8 Unit atau sebesar 100 %. Data tambatan perahu yang dibangun/rehab tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15:
Data Tambatan Perahu yang Dibangun/Rehab Tahun 2024

No	Nama	Alamat
1	Rehap Tambatan Perahu Pantai Lemo	Desa Mabonta Kec. Burau
2	Pembangunan Bangsal TPI	Desa Balo-Balo Kec. Wotu
3	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Lampenai Kec. Wotu
4	Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Bau-Bau	Desa Tabaroge Kec. Wotu
5	Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu	Desa Watampanua Kec. Angkona
6	Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Lambaru Desa Tampinna	Desa Tampinna Kec. Angkona
7	Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu	Desa Lakawali Kec. Malili
8	Rehabilitasi Tambatan Perahu	Desa Harapan Kec. Malili

3) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp10.285.300.000 dan terealisasi sebesar Rp 9.880.190.568 atau 96,06 %. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang

terjamin dan tersedia dengan target kinerja 69 Unit dan terealisasi 68 Unit atau sebesar 98,55 %. Tidak terealisasinya 1 unit karena administrasi kelengkapan kelompok Biwan Desa Bawalipu sebagai penerima bantuan yang belum lengkap sampai TW IV berakhir, sehingga tidak dapat diproses untuk menerima bantuan.

Data sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16:
Data Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Tahun 2024

No	Nama	Alamat
1	Kelompok Pangkilang Rakko	Desa Loeha Kec. Towuti
2	Kelompok Janggo Larona	Desa Bantilang Kec. Towuti
3	Kelompok Komo Bersatu	Desa Bantilang Kec. Towuti
4	Kelompok Nelayan Laorona Indah	Desa Bantilang Kec. Towuti
5	Kelompok Sipakkamase	Desa Wewangriu Kec. Malili
6	Kelompok Watu Malangnga	Desa Lampenai Kec. Wotu
7	Kelompok Tenggiri Desa Puncak Indah Kec. Malili	Desa Puncak Indah Kec. Malili
8	Kelompok Beringin Sejati	Desa Lakawali Kec. Malili
9	Kelompok Bunga Karang	Desa Balantang Kec. Malili
10	Kelompok Jambu	Desa Tampinna Kec. Angkona
11	Kelompok Laskar 02	Desa Lakawali Kec. Malili
12	Kelompok Laskar Lakawali	Desa Lakawali Kec. Malili
13	Kelompok Massama Turue	Desa Burau Pantai Kec. Burau
14	Kelompok Pipos	Desa Tokalimbo Kec. Towuti
15	Kelompok Samudera Biru	Desa Harapan Kec. Malili
16	Kelompok Semangat Baru	Desa Lampenai Kec. Wot
17	Kelompok Sinar Laut	Desa Mabonta Kec. Burau
18	Kelompok Muara Cerekang	Desa Manurung Kec. Malili
19	Kelompok Muara Malili	Desa Manurung Kec. Malili
20	Kelompok Ombak Karappe	Desa Bantilang Kec. Towuti
21	Kelompok Tirowali I	Desa Timampu Kec. Towuti
22	Kelompok Tunas Tumbuh	Desa Timampu Kec. Towuti
23	Kelompok Boroliu	Desa Lampenai Kec. Wotu
24	Kelompok Cahaya Tomba	Desa Manurung Kec. Malili
25	Kelompok Jelajah Muara	Desa Manurung Kec. Malili

No	Nama	Alamat
26	Kelompok Natuna	Desa Manurung Kec. Malili
27	Kelompok Nelayan Sejahtera Balantang	Desa Balantang Kec. Malili
28	Kelompok Nelayan Tambak Asri	Desa Lakawali Kec. Malili
29	Kelompok Ombak Biru	Desa Manurung Kec. Malili
30	Kelompok Seroja	Desa Bahari Kec. Wotu
31	Kelompok Benua Biru	Desa Balantang Kec. Malili
32	Kelompok Beringin Baru	Desa Baruga Kec. Malili
33	Kelompok Beringin Laut	Desa Balantang Kec. Malili
34	Kelompok Juku Eja	Desa Wewangriu Kec. Malili
35	Kelompok Setia Kawan Dua	Desa Lakawali Kec. Malili
36	Kelompok Lacebbu Jaya	Desa Lauwo Kec. Burau
37	Kelompok Lenggiri	Desa Lampenai Kec. Wotu
38	Kelompok Lintas Bakau	Desa Ussu Kec. Malili
39	Kelompok Peda - Peda	Desa Harapan Kec. Malili
40	Kelompok Pentomua	Desa Lampenai Kec. Wotu
41	Kelompok Rinjani li	Desa Lakawali Kec. Malili
42	Kelompok Setia Kawan	Desa Bawalipu Kec. Wotu
43	Kelompok Siparennu	Desa Lauwo Kec. Burau
44	Kelompok Sipatokkong	Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
45	Kelompok Tanjung Waru Waru	Desa Harapan Kec. Malili
46	Kelompok Teluk Bone	Desa Harapan Kec. Malili
47	Kelompok Tunas Baru Poreang	Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
48	Kelompok Sumber Rejeki	Desa Atue Kec. Malili
49	Kelompok Berkah Tani	Desa Manurung Kec. Malili
50	Kelompok Bersatu	Desa Wewangriu Kec. Malili
51	Kelompok Bina Nelayan	Desa Timampu Kec. Towuti
52	Kelompok Cahaya Bubu	Desa Maliwowo Kec. Angkona
53	Kelompok Harapan Baru	Desa Bawalipu Kec. Wotu
54	Kelompok Laut Indah	Desa Harapan Kec. Malili
55	Kelompok Merpati	Desa Wewangriu Kec. Malili
56	Kelompok Mitra Utama	Desa Balantang Kec. Malili
57	Kelompok Muara Malili	Desa Balantang Kec. Malili
58	Kelompok Petta Malangkese	Desa Tampinna Kec. Angkona
59	Kelompok Putra Luwu	Desa Baruga Kec. Malili
60	Kelompok Rajawali Desa Lauwo Kec. Burau	Desa Lauwo Kec. Burau
61	Kelompok Sinar Laut Pantai	Desa Lakawali Kec. Malili
62	Kelompok Bintang Laut	Desa Balo - Balo Kec. Wotu
63	Kelompok Laut Biru	Desa Wewangriu Kec. Malili
64	Kelompok Masempo Dalle	Desa Ussu Kec. Malili

No	Nama	Alamat
65	Kelompok Nelayan Harapan Jaya	Desa Pekaloea Kec. Towuti
66	Kelompok Nelayan Pesisir Towuti	Desa Pekaloea Kec. Towuti
67	Kelompok Nelayan Tomebeta Pesisir	Desa Rante Angin Kec. Towuti
68	Kelompok Salekoe	Desa Lampenai Kec. Wotu

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap merupakan salah satu Program Prioritas (KP 1) Bupati terpilih. Dimana dari tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 160 Kelompok yang telah menerima bantuan dari target Renstra 75 Kelompok

Tabel 3.17:
Program Prioritas (KP 1) Pemberian Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Bagi Nelayan

No	Uraian	Target 2022-2026	Realisasi 2022-2026	Persen tase
1	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan	75 Kelompok	160 Kelompok	213,33 Persen

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Program Prioritas (KP 1) pemberian sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan telah melampaui target yang telah ditetapkan sebanyak 85 kelompok atau 213,33 persen.

4) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp42.058.300 dan terealisasi sebesar Rp 26.227.000 atau 62,36 %. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya belanja perjalanan dinas yang tidak terpakai disebabkan rata-rata pertemuan dilaksanakan secara *daring (zoom meeting)*. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya dengan target kinerja 20 Orang dan terealisasi 20 Orang.

5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp173.847.000 dan terealisasi sebesar Rp 119.005.237 atau 68,45 %. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya belanja perjalanan dinas yang tidak terpakai disebabkan rata-rata pertemuan dilaksanakan secara *daring* (*zoom meeting*). Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya dengan target kinerja 12 Kelompok dan terealisasi 12 Kelompok atau sebesar 100 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendampingi kelompok dalam pengembangan kapasitas kelompok mereka sehingga ada peningkatan tingkatan jenjang kelompok dari tingkat pemula hingga madya.

6) Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp66.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 61.520.169,75 atau 95,73 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan target kinerja 1 Unit dan terealisasi 1 Unit atau sebesar 100 %. Kegiatan meliputi Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Ussu Kec. Malili.

b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran untuk Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp71.336.500 dan terealisasi sebesar Rp41.425.500 atau 58,07 %. Indikator Program adalah persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dengan target kinerja 96 Persen dan terealisasi 96 Persen. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar sebesar Rp71.336.500 dan terealisasi sebesar Rp41.425.500 atau 58,07 %. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif dengan target kinerja 100 % dan terealisasi 100 %. Data kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.18:
Data Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Aktif Tahun 2024

No	Nama	Alamat	Jumlah Anggota
1	Bintang Timur	Malili	22 Orang
2	Harapan Baru	Angkona	21 Orang
3	Lalambate	Wotu	20 Orang
4	Teluk Bone	Burau	20 Orang
5	Lampia	Harapan	16 Orang
6	Pasi-Pasi	Pasi-Pasi	10 Orang
7	Burau Pantai	Burau Pantai	14 Orang
8	Balo-Balo	Balo-Balo	30 Orang
9	Cinta Bahari	Bawalipu	33 Orang
10	PM WTC	Manurung	19 Orang

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2024

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp71.336.500 dan terealisasi sebesar Rp41.425.500 atau 58,07 %. Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan adanya belanja BBM dan jasa tenaga keamanan

yang tidak terealisasi karena pengawasan hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali hingga tahun 2024 berakhir. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota dengan target kinerja 4 Dokumen dan terealisasi 4 Dokumen atau 100 %.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Alokasi anggaran untuk Program ini adalah sebesar Rp 7.627.026.200 dan terealisasi sebesar Rp6.451.049.134,67 atau 84,58 %. Indikator Program adalah jumlah produksi perikanan budidaya dengan target kinerja 378.997 Ton dan terealisasi 385.613,16 Ton atau 101,75 %. Data Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.19 :
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi
1	Ikan Mas	454,33
2	Ikan Nila	290,06
3	Ikan Lele	323,09
4	Ikan Betok	1,53
5	Ikan Bawal Tawar	17,07
6	Ikan Bandeng	12.271,89
7	Ikan Mujair	259,95
8	Ikan Gurame	36,01
9	Udang Windu	544,02
10	Udang Api – Api	1.335
11	Udang Vaname	1.483,19
12	Kepiting	179,16
13	Rumput Laut Cattoni	212.391,26
14	Rumput Laut Gracillaria	156.026,57
Jumlah		385.613,13

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2024

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, yaitu:

Kegiatan

1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp303.635.200 dan terealisasi sebesar Rp178.103.430

atau 58,66 %. Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan adanya belanja yang tidak realisasi pada salah satu sub kegiatan. Keluaran kegiatan ini adalah persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan) dengan target kinerja 100 Persen dan terealisasi 100 Persen. Pada tahun 2024 jumlah kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan berjumlah 42 kelompok sesuai dengan target 42 kelompok.

2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp7.323.391.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.272.945.704,67 atau 85,65 %. Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan adanya belanja yang tidak terealisasi pada salah satu sub kegiatan. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan dengan target kinerja 100 Persen dan terealisasi 94,74 Persen. Pada Tahun 2024 sarana dan prasarana pembudidaya yang disediakan berjumlah 56 Unit yang terdiri dari 1 Unit Pembangunan Tempat Pengikatan Bibit Rumput Laut, 7 unit Jembatan Tambak, 1 Unit Sarana Balai Benih Ikan (BBI), 5 Unit Jalan Produksi, 1 Unit Normalisasi Saluran Air Tambak dan 41 Unit bantuan sarana untuk kelompok pembudidaya ikan, namun ada 3 unit yang tidak terealisasi.

 Sub Kegiatan**1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil**

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp22.598.200 dan terealisasi sebesar Rp16.148.000 atau 71,46 %. Masih ada tersisa Rp6.450.200 yang tidak terealisasi. Terdiri dari belanja BBM Rp279.200 yang tidak terealisasi karena kelompok tani menyediakan sendiri BBMnya untuk kegiatan percontohan. Selain itu terdapat belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp1.800.000, honor narasumber Rp1.000.000 dan perjalanan dinas Rp3.207.000 yang tidak terealisasi. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas dengan target kinerja 12 Kelompok dan terealisasi 12 Kelompok atau 100 %.

2) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 281.037.000 dan terealisasi sebesar Rp161.955.430 atau 57,63 %. Tersisa Rp119.081.570 yang tidak terealisasi. Terdiri dari belanja bahan lainnya (demplot) sebesar Rp 56.550.000 yang tidak terealisasi karena calon lokasi milik kelompok tidak siap digunakan. Selain itu terdapat belanja makanan dan minuman rapat Rp 4.820.000, honor narasumber Rp10.000.000, sewa kendaraan dinas perorangan (transport peserta) Rp17.000.000, sewa kendaraan dinas penumpang (transport pemateri) Rp 700.000 dan sewa hotel Rp 500.000, dimana kegiatan sosialisasi yang dianggarkan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali hanya terlaksana 1 kali serta perjalanan dinas

sebanyak Rp 28.970.570 yang tidak terlaksana. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan target kinerja 30 Kelompok dan terealisasi 30 Kelompok atau 100 %.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 74.612.000 dan terealisasi sebesar Rp64.019.900 atau 85,80 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 4 Dokumen dan terealisasi 4 Dokumen atau 100 %.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp3.080.300.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.564.820.102,67 atau 83,26 %. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota ini dengan rincian yaitu:

- a) Jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab dengan target kinerja 1 unit dan terealisasi 1 unit;
- b) Jumlah jembatan tambak yang disediakan dengan target kinerja 7 unit dan terealisasi 6 unit. Hal ini disebabkan adanya 1 unit yang tidak terealisasi karena akses material ke lokasi yang sulit dan tingginya air pasang di laut sehingga sampai 31 Desember 2024 progres pekerjaan baru mencapai 18,62 persen dan diberi kesempatan (addendum kontrak) hingga 28 Januari 2025 (50 hari kalender);

- c) Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun dan ditingkatkan dengan target kinerja 5 unit dan terealisasi 5 unit.
- d) Jumlah saluran air tambak yang dinormalisasikan dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit; dan
- e) Jumlah tempat pengikatan bibit rumput laut dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit.

Data prasarana pembudidaya yang dibangun/rehab tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.20:
Data Prasarana Pembudidayaan Ikan yang Dibangun/Rehab Tahun 2024

No	Nama	Alamat
1.	Pembangunan Tempat Pengikatan Bibit Rumput Laut	Desa Mabonta Kec. Burau
2.	Peningkatan Jalan Produksi	Kelompok Dongi Dongi Jaya Desa Tabaroge Kec. Wotu
3.	Pembangunan Jembatan Tambak	Desa Tabaroge Kec. Wotu
4.	Pembangunan Jembatan Tambak Dusun Tabaroge Desa Tabaroge	Dusun Tabaroge Desa Tabaroge Kec. Wotu
5.	Rehabilitasi Jembatan Tambak	Desa Bahari Kec. Burau
6.	Pembentukan Jalan Produksi	Kelompok Benteng Mandiri Desa Tampinna Kec. Angkona
7.	Pembentukan Jalan Produksi	Kelompok Takkalasi Pantai Desa Maliwowo Kec. Angkona
8.	Pembentukan Jalan Produksi Tambak	Desa Wewangriu Kec. Malili
9.	Peningkatan Jalan Produksi	Kelompok Ladoping Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
10.	Pembangunan Jembatan Tambak	Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
11.	Pembangunan Jembatan Tambak Ladoping	Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
12.	Pembangunan Jembatan Tambak Semesta Merah I	Desa Lakawali Kec. Malili
13.	Normalisasi Saluran air Tambak	Kelompok Wewangriu Jaya Desa Wewangriu Kec. Malili
14.	Peningkatan Jalan Produksi	Kelompok sejahtera Desa wewangriu kec. Malili

No	Nama	Alamat
15.	Pembangunan Pagar BBI Towuti	Desa Baruga Kec. Towuti

Pembangunan, pembentukan dan peningkatan jalan produksi tambak merupakan salahsatu Kegiatan Prioritas (KP 1) Bupati Terpilih. Dimana dari tahun 2022 sampai 2024, jumlah jalan produksi tambak yang telah terbangun sebanyak 25,06 km dari target 20 km.

Tabel 3.21:
Program Prioritas (KP 1) Pemberian Benih Unggul serta Sarana dan Penunjangnya (Jalan Produksi Tambak yang Dibangun/Ditingkatkan) Tahun 2022-2024

No	Uraian	Target 2022-2026	Realisasi 2022-2026	Perse ntase
1	Jalan produksi tambak yang dibangun/ditingkatkan	20 Km	25,06 Km	125,3 %

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, pembangunan dan peningkatan jalan produksi tambak telah melebihi target yang telah ditetapkan sepanjang 5,06 km atau 125,3 persen.

Kegiatan pembangunan jembatan tambak merupakan salahsatu Kegiatan Prioritas (KP 1) Bupati Terpilih. Dimana dari tahun 2022 sampai 2024, jumlah jembatan tambak yang telah terbangun sebanyak 14 unit dari target 15 unit.

Tabel 3.22:
Program Prioritas (KP 1) Pemberian Benih Unggul serta Sarana dan Penunjangnya (Jembatan Tambak yang Dibangun) Tahun 2022-2024

No	Uraian	Target 2022-2026	Realisasi 2022-2026	Persen tase
1	Jembatan tambak yang dibangun	15 Unit	14 Unit	93,33 %

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Program Prioritas (KP 1) pembangunan jembatan tambak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana realisasi sampai tahun 2024 baru mencapai 14 unit atau 93,33 persen. Artinya masih ada 1 unit jembatan tambak yang akan dibangun untuk mencapai target Renstra sebanyak 15 unit.

5) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp3.6823.60.000 dan terealisasi sebesar Rp3.368.057.402 atau 91,46 %. Keluaran Sub kegiatan ini adalah jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 41 Unit dan terealisasi 39 Unit atau sebesar 95,12 %. Keluaran Sub kegiatan ini tidak tercapai disebabkan Kelompok tani tidak siap untuk kegiatan percontohan pembuatan pakan ikan dengan teknologi baru dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk dilaksanakan di Bulan Desember.

Data sarana pembudidayaan ikan yang tersedia tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.23:
Data Sarana Pembudidayaan Ikan Tahun 2024

No	Nama	Alamat
1.	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Samaturu Marampa Desa Rantemario Kec. Tomoni
2.	Sarana Prasarana Budidaya Air Payau	Kelompok Tiu Jaya Desa Wewangriu Kec. Malili
3.	Sarana Prasarana Budidaya Air Payau	Kelompok Bina Karya Desa Lauwo Kec. Burau
4.	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Bonti-Bonti Desa Timampu Kec. Towuti
5.	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Ulam Sari Desa Taripa Kec. Angkona
6.	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Ulam Tunas Jaya Desa Taripa Kec. Angkona
7.	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Kayulangi Mandiri Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
8.	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Marampa Desa Rante Mario Kec. Tomoni
9.	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Mawar Kuning Desa Lakawali Kec. Malili
10.	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok PADAIDI Desa Sumber Agung Kec. Kalaena
11.	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Sumber Pelita Desa Sumber Makmur Kec. Kalaena
12.	Sarana Prasarana	Kelompok Tunas Baru Desa

No	Nama	Alamat
	Budidaya Ikan Air Tawar	Matano Kec. Nuha
13	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Pasir Putih Langkara Desa Tampinna Kec. Angkona
14	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Amanah Desa Bureau Pantai Kec. Bureau
15	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Bocah Liar Desa Lampenai Kec. Wotu
16	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Bawalipu Kec. Wotu	Kelompok Brokoli Desa Bawalipu Kec. Wotu
17	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Delon Desa Bawalipu
18	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Kanna Desa Lampenai Kec. Wotu
19	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Karya Makmur Lambaru Desa Tampinna Kec. Angkona
20	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Katonik Lauro Desa Tampinna Kec. Angkona
21	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Katonik Mandiri Desa Bawalipu Kec. Wotu
22	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Lestari Alam Katonik Desa Bawalipu Kec. Wotu
23	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Masagenae Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
24	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Nelayan Katonik Desa Bawalipu Kec. Wotu
25	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Paten Katonik Desa Lampenai Kec. Wotu
26	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Perjuangan Desa Maliwowo Kec. Angkona
27	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sawerigading Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
28	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sipakarennu Dusun Podomoro Desa Lakawali Kec. Malili
29	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sipammase-mase Desa Watangpanua Kec. Angkona
30	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sumber Harapan Desa Lakawali Kec. Malili
31	Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Tani Nelayan Desa Lampenai Kec. Wotu
32	Sarana Budidaya Air Payau	Kelompok Sikamasei Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
33	Sarana Budidaya	Kelompok Sinar Katonik

No	Nama	Alamat
	Rumput Laut	Desa Tampinna Kec. Angkona
34	Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Museddi Desa Balo-Balo Kec. Wotu
35	Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Beringin Katonik Desa Bawalipu Kec. Wotu
36	Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Beringin Brokoli Desa Bawalipu Kec. Wotu
37	Sarana Budidaya Air Payau	Kelompok Sipatuo Desa Ussu Kec. Malili
38	Sarana Budidaya Air Tawar	Kelompok Usaha Baru Desa Laskap Kec. Malili
39	Sarana Budidaya Air Tawar	Kelompok Sumber Rejeki Desa Lera Kec. Wotu
40	Sarana Budidaya Air Tawar	Kelompok Harapan Sejahtera Desa Lera Kec. Wotu
41	Sarana Budidaya Air Tawar	Kelompok Mataram Sukses Desa Lera Kec. Wotu

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 1) Bupati terpilih dengan indikator Jumlah benih unggul yang diserahkan ke kelompok pembudidaya dimana dari tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 183 Kelompok yang telah mendapatkan bantuan dari target renstra 100 kelompok. Data Jumlah kelompok yang telah menerima bantuan dari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.24:

Program Prioritas (KP 1) Pemberian Benih Unggul serta Sarana dan Penunjangnya (Benih Unggul serta Sarana Pembudidayaan Ikan yang Tersedia) Tahun 2022-2024

No	Uraian	Target 2022-2026	Realisasi 2022-2026	Persentase
1	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidayaan ikan yang tersedia	100 Kelompok	183 Kelompok	183 %

Berdasarkan tabel di atas, Program Prioritas (KP 1) jumlah benih unggul serta sarana pembudidayaan ikan yang tersedia telah mencapai target yang ditetapkan atau sebesar 183 persen.

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 218.463.000 dan terealisasi sebesar Rp62.904.400 atau 28,79 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan dengan target kinerja 4 Dokumen dan terealisasi 4 Dokumen atau 100%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya kegiatan sosialisasi penanganan hama dan penyakit ikan yang tidak terlaksana. Selain itu terdapat belanja jasa tenaga pelayanan umum yang tidak terealisasi karena upah jasa mengundurkan diri. Terdapat pula belanja modal laboratorium lain yang tidak terealisasi karena keterlambatan pengadaan dan kurangnya spesifikasi teknis yang jelas.

7) Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 267.656.000 dan terealisasi sebesar Rp213.143.900 atau 79,63 %. Keluaran kegiatan ini adalah luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi dengan target kinerja 1.000 Ha dan terealisasi 1.000 Ha atau 100 %. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya belanja bibit ikan, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, makan minum tamu, jasa tenaga administrasi dan perjalanan dinas yang tidak dikembalikan atau di *refocusing*.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 1.574.909.500 dan terealisasi sebesar Rp1.263.093.439,60 atau

80,20 %. Indikator Program adalah produksi hasil pengolahan ikan dengan target kinerja 565 Ton dan terealisasi 561,68 Ton atau 99,41 %. Data Produksi Hasil Pengolahan Ikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.25 :
Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Ikan Tahun 2024

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi
1	Peragian/Fermentasi Ikan	2,62
2	Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan	3,24
3	Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi	2,60
4	Pembekuan Ikan	6,10
5	Pengasapan/Pemanggang Ikan	5,56
6	Penggaraman/Pengeringan Ikan	532,79
7	Pengolahan Rumput Laut	3,58
8	Pengolahan lainnya	4,89
Jumlah		561,68

Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu:

Kegiatan

1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp195.115.000 dan terealisasi sebesar Rp171.671.816 atau 87,98 %. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) dengan target kinerja 100 Persen, realisasi 100 Persen.

Tabel 3.26:
Data Kelompok yang Melakukan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (RTP) Tahun 2024

No	Nama	Alamat
1	Pengolahan Fermentasi (Terasi)	Kelompok Harapan Baru Desa Maliwowo Kec. Angkona
2	Pengolahan Amplang Ikan	Kelompok Amanah Desa Tampinna Kec. Angkona
3	Pengolahan Fermentasi (Terasi)	Kelompok Cahaya Berkah Desa Maliwowo Kec. Angkona
4	Pengolahan Abon Ikan	Kelompok Asoka Desa Tampinna Kec. Angkona

No	Nama	Alamat
5	Pengolahan Ikan Asin Pangkilang	Kelompok Melati Desa Timampu Kec. Towuti
6	Pengolahan Ikan Asin Pangkilang	Kelompok Mawar Desa Timampu Kec. Towuti
7	Pengolahan Crispy Pangkilang, Sambala Pangkilang dan Samabl Kiboys	Kelompok Muthy Andalangnge Desa Wawondula Kec. Towuti
8	Pengolahan Abon Ikan	Kelompok Kartini Berkarya Desa Bantilang Kec. Towuti
9	Pengolahan Crispy Pangkilang	Kelompok Mutiara Danau Towuti Desa Tokalimbo Kec. Towuti
10	Pengolahan Ikan Asap	Kelompok Karya Bersama Desa Tokalimbo Kec. Towuti
11	Pengolahan Amplang	Kelompok Bina Sejahtera Desa Tokalimbo Kec. Towuti
12	Pengolahan Krupuk Rumput Laut	Kelompok Inara Sejahtera Desa Matompi Kec Towuti
13	Pengolahan Bandeng tanpa duri, Nugget Ikan Bandeng	Kelompok Nizam Arsy Desa Manurung Kec. Malili
14	Pengolahan Pengolahan Ikan Asin	Kelompok Lure Desa Wewangriu Kec. Malili
15	Pengolahan Abon Ikan Bandeng	Kelompok Dapur Malili River Desa Wewangriu Kec. Malili
16	Pengolahan Abon Ikan Bandeng dan Nugget Udang	Kelompok Tunas Baru Desa Lakawali Kec. Malili
17	Pengolahan Stick Rumput Laut, Krupuk Rumput Laut dan Amplang Ikan	Kelompok Mitra Ibu Desa Lumbewe Kec. Burau
18	Pengolahan Abon Ikan	Kelompok Cendana Berkah Desa Cendana Kec Burau

2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp153.439.000 dan terealisasi sebesar Rp133.595.900 atau 87,07 %. Keluaran kegiatan ini adalah persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya dengan target kinerja 83 Persen dan terealisasi 83 Persen

3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp1.226.355.500 dan terealisasi sebesar Rp957.825.723,6 atau 78,10 %. Keluaran kegiatan ini adalah persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang dengan target kinerja 73 Persen, realisasi 73 Persen.

Sub Kegiatan

1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp195.115.000 dan terealisasi sebesar Rp171.671.816 atau 87,98 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko dengan target kinerja 4 Dokumen dan terealisasi 4 Dokumen atau sebesar 100 %.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp153.439.000 dan terealisasi sebesar Rp133.595.900 atau 87,07 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko dengan target kinerja 10 unit usaha dan terealisasi 10 unit usaha atau sebesar 100 %.

3) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp1.226.355.500 dan terealisasi sebesar Rp957.825.723,6 atau 78,10 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dengan target 5 pelaku usaha dan terealisasi 1 pelaku usaha atau 20 %. Terdapat 4 pelaku usaha yang tidak terfasilitasi karena tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan (SKT dan laporan produksi).

Tabel 3.27:
Data Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Tahun 2024

No	Nama	Alamat
1	Rehabilitasi Gudang Rumput Laut 2 Lakawali Pantai	Desa Lakawali Pantai Kec. Malili
2	Pembangunan Rumah Produksi	Kelompok Saloborro Desa Bawalipu Kec. Wotu

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 5.079.417.700 dan terealisasi sebesar Rp4.773.626.921 atau 93,98 Persen dengan kategori sangat tinggi. Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar. Target yang ditetapkan sebesar 100 % terealisasi 93,98 %. dengan rincian capaian :

Kegiatan

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp122.989.500 dan terealisasi sebesar Rp121.126.541

atau 98,49 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 %. Dimana dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun adalah Renja SKPD Pokok dan Perubahan, DPA Pokok dan Perubahan, serta Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp3.562.822.450 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.344.624.240 atau 93,88 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % terealisasi 100 %.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp52.858.000 dan terealisasi sebesar Rp52.254.050 atau 98,86 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang diadministrasi sesuai standar dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % terealisasi 100 %.

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp14.849.000 dan terealisasi sebesar Rp14.612.000 atau 98,40 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % terealisasi 13,10 %. Kurangnya realisasi terhadap kegiatan ini disebabkan tidak tercapainya target PAD yang

direncanakan karena beberapa objek PAD yang di sewa pihak ketiga sudah tidak beroperasi/putus kontrak.

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 110.841.850 dan terealisasi sebesar Rp99.391.570 atau 89,67 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 %.

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp736.196.900 dan terealisasi sebesar Rp725.430.067 atau 98,54 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 %.

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp60.000.000 dan terealisasi sebesar Rp59.016.780 atau 98,36 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini yaitu persentase barang milik daerah penunjang yang terpenuhi dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 %.

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp272.600.000 dan terealisasi sebesar Rp239.739.973 atau 87,95 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 %.

9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp146.260.000 dan terealisasi sebesar Rp117.431.700 atau 80,29 %. Indikator kinerja pada Kegiatan ini persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 %.

✚ Sub Kegiatan

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 38.395.500 dan terealisasi sebesar Rp38.052.600 atau 99,11 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan target yang ditetapkan sebesar 2 Dokumen dan terealisasi 2 Dokumen atau 100 %. Dokumen yang disusun adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp4.728.000 dan terealisasi sebesar Rp4.288.750 atau 90,71 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target yang ditetapkan sebesar 2 Dokumen dan terealisasi 2 Dokumen atau 100 %. Dokumen yang disusun adalah RKA Pokok dan Perubahan.

3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 5.918.000 dan terealisasi sebesar Rp5.534.000 atau 93,51 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini Jumlah

Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target yang ditetapkan sebesar 2 Dokumen dan terealisasi 2 Dokumen atau 100 %. Dokumen yang disusun adalah DPA Pokok dan Perubahan.

4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 73.948.000 dan terealisasi sebesar Rp73.251.191 atau 99,06 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target yang ditetapkan sebesar 10 Dokumen dan terealisasi 10 Dokumen atau 100 %. Dokumen yang disusun adalah 4 Dokumen Laporan Evaluasi Renja, 1 Dokumen LKPJ, 1 Dokumen LPPD, dan 4 Dokumen Evaluasi Lakip.

5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 3.475.048.450 dan terealisasi sebesar Rp3.257.621.605 atau 93,74 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target yang ditetapkan sebesar 26 Orang dan terealisasi 26 Orang atau 100 %.

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp87.774.000 dan terealisasi sebesar Rp87.002.635 atau 99,12 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan target yang ditetapkan sebesar 18 Dokumen dan terealisasi 18 Dokumen. Dokumen tersebut adalah Dokumen laporan

keuangan secara bulanan 12, Dokumen secara triwulan 2 Dokumen, LRA 1 Dokumen, dan CaLK 1 Dokumen.

7) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 52.858.000 dan terealisasi sebesar Rp52.254.050 atau 98,86 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target yang ditetapkan sebesar 4 Dokumen dan terealisasi 4 Dokumen.

8) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 14.849.000 dan terealisasi sebesar Rp14.612.000 atau 98,40 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini adalah jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah dengan target yang ditetapkan sebesar 4 Dokumen dan terealisasi 4 Dokumen.

9) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 25.911.850 dan terealisasi sebesar Rp25.484.300 atau 98,35 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target yang ditetapkan sebesar 12 Dokumen dan terealisasi 12 Dokumen. Dokumen yang dimaksud yaitu mutasi, naik pangkat, KGB, SKP, Satya Lencana, Pensiun dan dokumen pendukung kepegawaian lainnya.

10) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 84.930.000 dan terealisasi sebesar Rp73.907.270 atau 87,02 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu

jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan target yang ditetapkan sebesar 8 Orang dan terealisasi 8 Orang atau 100 Persen. Capaian Realisasi keuangan 87,02 % disebabkan belanja kontribusi bimtek tidak terpakai karena rata-rata kontribusi kegiatan yang diikuti ditanggung oleh pihak penyelenggara.

11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 6.864.000 dan terealisasi sebesar Rp6.818.000 atau 99,33 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target yang ditetapkan sebesar 12 Jenis dan terealisasi 12 Jenis atau 100 Persen.

12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp128.750.000 dan terealisasi sebesar Rp 121.050.000 atau 94,02 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target yang ditetapkan sebesar 6 Paket dan terealisasi 6 paket atau 100 %.

13) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 10.685.500 dan terealisasi sebesar Rp10.630.000 atau 99,48 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target yang ditetapkan sebesar 20 Paket dan terealisasi 20 Paket atau 100 %.

14) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 10.070.000 dan terealisasi sebesar Rp8.930.000 atau 88,68 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target yang ditetapkan sebesar 4 paket dan terealisasi 4 paket atau 100 persen. Capaian Realisasi keuangan yaitu 88,68 %. Hal ini disebabkan kontrak pengadaan barang cetak dan penggandaan yang agak murah sehingga ada anggaran yang tersisa.

15) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 7.500.000 dan terealisasi sebesar Rp5.900.000 atau 78,67 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target yang ditetapkan sebesar 48 Dokumen dan terealisasi 48 Dokumen. Capaian Realisasi Keuangan 78,67 %. Hal ini disebabkan kontrak pengadaan bahan bacaan yang rendah di banding anggaran yang ditetapkan sehingga ada anggaran yang tersisa.

16) Fasilitas Kunjungan Tamu

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 13.220.000 dan terealisasi sebesar Rp13.007.000 atau 98,39 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan target yang ditetapkan sebesar 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan.

17) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp559.107.400 dan terealisasi sebesar Rp 559.095.067 atau 100 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target yang ditetapkan sebesar 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan.

18) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp. 60.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 59.016.780 atau 98,36 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target yang ditetapkan 1 Unit dan terealisasi 1 Unit.

19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 3.500.000 dan terealisasi sebesar Rp3.455.000 atau 98,71 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target yang ditetapkan sebesar 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan.

20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 85.500.000 dan terealisasi sebesar Rp75.184.973 atau 87,94 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target yang

ditetapkan sebesar 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan.

21) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 183.600.000 dan terealisasi sebesar Rp161.100.000 atau 87,75 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target yang ditetapkan sebesar 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan.

22) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 94.210.000 dan terealisasi sebesar Rp66.619.700 atau 70,71 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target yang ditetapkan sebesar 23 Unit dan terealisasi 23 Unit. Capaian Realisasi keuangan yaitu 70,71 %. Hal ini disebabkan rendahnya belanja pemeliharaan *speedboat* dan pemeliharaan kendaraan roda 4.

23) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 23.450.000 dan terealisasi anggaran sebesar Rp23.320.000 atau 99,45 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target yang ditetapkan sebesar 40 Unit dan terealisasi 40 Unit.

24) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah Rp 28.600.000 dan terealisasi sebesar Rp27.492.000 atau

96,13 %. Indikator kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target yang ditetapkan sebesar 6 Unit dan terealisasi 6 Unit.

III.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

1. Realisasi Keuangan

a. Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28:
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	Persen
1	Retribusi Penyediaan Parkiran Ditepi Jalan Umum (Parkiran TPI Malili dan TPI Wotu)	102.000.000	19.874.000	19,48
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Gudang Rumput Laut, Sewa Pabrik Es, Sewa SPDN dan Sewa Pabrik rumput laut)	183.500.000	5.000.000	2.72
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	79.200.000	20.219.000	25,52
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (retribusi penjualan Balai Benih Ikan)	160.200.000	23.670.000	14.77
Jumlah		524.900.000	68.763.000	13.10

Berdasarkan tabel di atas jumlah pendapatan Dinas Perikanan pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk Retribusi Penyediaan Parkiran di tepi Jalan Umum (Parkiran TPI Malili dan TPI Wotu) hanya 19,48 Persen, hal ini disebabkan lambatnya proses pemungutan yang dilakukan sehingga hasil pemungutan retribusi kurang maksimal, begitu pula dengan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan, Untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan, hanya 2,72 Persen disebabkan pihak ketiga yang menyewa gudang rumput laut belum mampu menyetorkan biaya sewa sebagaimana dalam surat penetapan

dikarenakan pihak penyewa mengalami kendala keuangan pada akhir tahun. Sedangkan Pendapatan pada sector Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak mencapai target disebabkan kurang produksi benih ikan yang dihasilkan Balai Benih Ikan (BBI) akibat Hama dan Penyakit sehingga inilah yang menyebabkan retribusi penjualan produksi usaha daerah tidak mencapai target

b. Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Target dan realisasi belanja Dinas Perikanan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.29:
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	Persen
	BELANJA DAERAH	26.780.307.700	24.093.098.656,59	89,97
1	Belanja Operasi	22.287.067.700	20.611.597.752,10	92.48
	Belanja Pegawai	3.548.728.450	3.331.301.605	93,87
	Belanja Barang dan Jasa	18.738.339.250	17.280.296.147,10	92.22
	Belanja Hibah	-	-	-
2	Belanja Modal	4.493.240.000	3.481.500.904,49	77.48
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	842.050.000	652.882.000	77.53
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.251.390.000	1.888.178.766,75	83.87
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.399.800.000	940.440.137,74	67.18

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi belanja Dinas Perikanan pada tahun 2024 sebesar Rp26.780.307.700 dengan realisasi sebesar Rp24.093.098.656,59 atau 89.97 % yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) dengan total anggaran Rp22.287.067.700 dan terealisasi Rp20.611.597.752,10 atau 92.48 dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi) dengan total anggaran Rp4.493.240.000 dan realisasi Rp 3.481.500.904,49 atau 77.48 %. Rendahnya realisasi pada Belanja Modal disebabkan adanya kegiatan pembangunan jembatan yang tidak selesai sampai tanggal 31 Desember.

Objek Belanja Dinas Perikanan berupa pelaksanaan dari 5 program yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun dan mengalami perubahan anggaran dalam tahun berjalan sebagaimana yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.30:
Target dan Realisasi Program Berdasarkan Dokumen Perubahan Tahun 2024

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.858.557.700	5.079.417.700	4.773.626.921,00	93,98%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9.911.437.800	12.427.617.800	11.563.903.661,32	93,05%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.417.026.200	7.323.391.000	6.451.049.134,67	84,58%
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	78.266.500	71.336.500	41.425.500,00	58,07%
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pangan	926.414.480	1.574.909.500	1.263.093.439,60	80,20%
TOTAL		22.820.307.700	26.780.307.700	24.093.098.656,59	89,97%

Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2024 Dinas Perikanan pada Anggaran Pokok melaksanakan 5 Program dengan jumlah anggaran Belanja Rp22.820.307.700. Sedangkan pada Perubahan Anggaran Dinas Perikanan melaksanakan 5 Program dengan jumlah anggaran Belanja Rp26.780.307.700. Ada penambahan pada anggaran belanja sebesar Rp3.960.000.000 yang digunakan untuk mengurangi dampak inflasi dengan memberikan bantuan ke masyarakat berupa benih unggul serta sarana dan penunjangnya serta sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan yang menggunakan Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja.

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan realisasi keuangan dan capaian kinerja pada tahun 2024, apabila dibandingkan persentase Realisasi Anggaran sebesar 89,97 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 94,39 %, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada

sasaran ini adalah sebesar 4,42 %. Adapun tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31:
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.079.417.700	4.773.626.921,00	93,98		
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	12.427.617.800	11.563.903.661,32	93,05		
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.323.391.000	6.451.049.134,67	84,58		
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	71.336.500	41.425.500,00	58,07		
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pangan	1.574.909.500	1.263.093.439,60	80,20		
TOTAL		22.820.307.700	24.093.098.656,59	89,97	94,39	4,42

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa Dinas Perikanan dalam pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 94,39 Persen. Menggunakan anggaran sebesar Rp24.093.098.656,59 atau 89,97 Persen, maka ada efisiensi sebesar 4,42 Persen terhadap anggaran yang disediakan dengan capain kinerja.

3. Analisa penyebab peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk menfokuskan sumber-sumberdaya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2024, juga tumbuhnya rasa percaya diri dan kemandirian bagi kelompok tani ikan dan nelayan.

b. Faktor Penyebab Kegagalan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran dari level sub Kegiatan, Kegiatan sampai program di tahun 2024 ini tidak ada yang dianggap gagal hanya saja pencapaiannya di bawah 80 Persen. Ini disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi

berbagai kebijakan serta program dan kegiatan dengan seluruh *stakeholder* unit-unit yang terlibat dalam proses pencapaian kinerja dan pengambil keputusan dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat.

c. Hambatan/Masalah yang Dihadapi Dalam Pencapaian Sasaran

- 1) Keterbatasan modal dan masih rendahnya pendapatan masyarakat nelayan sehingga tidak mampu melakukan penambahan dan perbaikan kapal;
- 2) Restrukturisasi pelaku nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan, dengan alasan menjadi nelayan adalah profesi jalan terakhir atau tidak menjanjikan;
- 3) Pengeloaan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal; dan
- 4) Rendahnya mutu dan daya saing produk hasil perikanan.

d. Strategi/Alternatif Solusi yang Dilakukan untuk Memecahkan Masalah

- 1) Restrukturisasi pelaku nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan, dengan alternative solusi dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah kegiatan peningkatan keterampilan/kapasitas pelaku utama perikanan, pendampingan sertifikasi laha nelayan, pembinaan desa pesisir dan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap; dan
- 2) Melaksanakan pembinaan kelompok pemasaran hasil perikanan dan pelaksanaan kegiatan pameran dan ekspo produk perikanan.

III.4 TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI PERBAIKAN-PERBAIKAN TAHUN LALU

Tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) pada Tahun 2023 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.32 :
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Lakip Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
1.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu setelah diformalkan	Telah Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu di bulan Januari 2024	Di bulan Januari 2024
2.	Menjelaskan definisi operasional	Telah menjelaskan definisi operasional	Telah di jelaskan pada Indikator Kinerja Sasaran eselon II
3.	Membuat Pedoman pola mutasi/rotasi (terdapat penjelasan mutasi dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya) dari BKPSDM	Akan dikoordinasikan dengan pihak yang terkait	Telah dikoordinasikan dengan BKPSDM
4.	Gunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Informasi terkait Data produksi perikanan yang menjadi realisasi tahun 2024 menjadi target di tahun 2025
5.	Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai memahami dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja	Telah mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja	informasi capaian kinerja telah di sampaikan pada setiap rapat internal



Bab IV

Penutup



BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Perikanan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam LAKIP tahun 2024 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 untuk semua sasaran strategis berikut indikator kinerjanya secara umum cukup bagus. Dengan demikian, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan telah terwujud. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari *stakeholder* secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan transparan.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, persentase capaian realisasi indikator kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan sebesar 97,52 %, indikator kinerja Produksi Perikanan mencapai 101,72 %, dan indikator kinerja Nilai Lakip mencapai 95,37 %.

Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan dalam hal ini, tingkat realisasi keuangan Tahun 2024 untuk mendukung semua sasaran tercapai dengan baik, dimana tingkat realisasi belanja sebesar 89,97 %, sedangkan untuk kinerja sebesar 94,39 %. Dukungan keuangan/pendanaan dari APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024 sangat membantu untuk mengoptimalkan pencapaian seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi perbandingan pencapaian sasaran/indikator selama Tahun 2021-2026 terhadap target sasaran/indikator kinerja RENSTRA selama 5 (lima) Tahun (2021-2026) secara umum tercapai sangat baik, proporsional dan diharapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu penetapan program dan kebutuhan prioritas yang terkadang tidak berkesesuaian dengan kesiapan anggaran, aparatur teknis lapangan dan pengelola yang belum mencukupi, kapasitas aparatur yang belum proposional dan tidak ter-*update*, serta pemetaan potensi kelautan dan perikanan yang belum lengkap.

IV.2 SARAN

1. Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
2. Mengusulan penambahan aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi Dinas Perikanan antara lain staf pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan;
3. Perlu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan; dan
4. Perlu dilakukan pemetaan potensi kelautan dan perikanan baik secara manual maupun digital melalui metode pemetaan GIS (*Geografical Informationa System*) atau metode lainnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik, bagi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dijadikan sebagai umpan balik dan acuan perencanaan tahun berikutnya, sebagaimana fungsi pokok dan tujuan dari penyusunan LAKIP.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, yang merupakan wujud peran serta Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung Penguatan Otonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur.

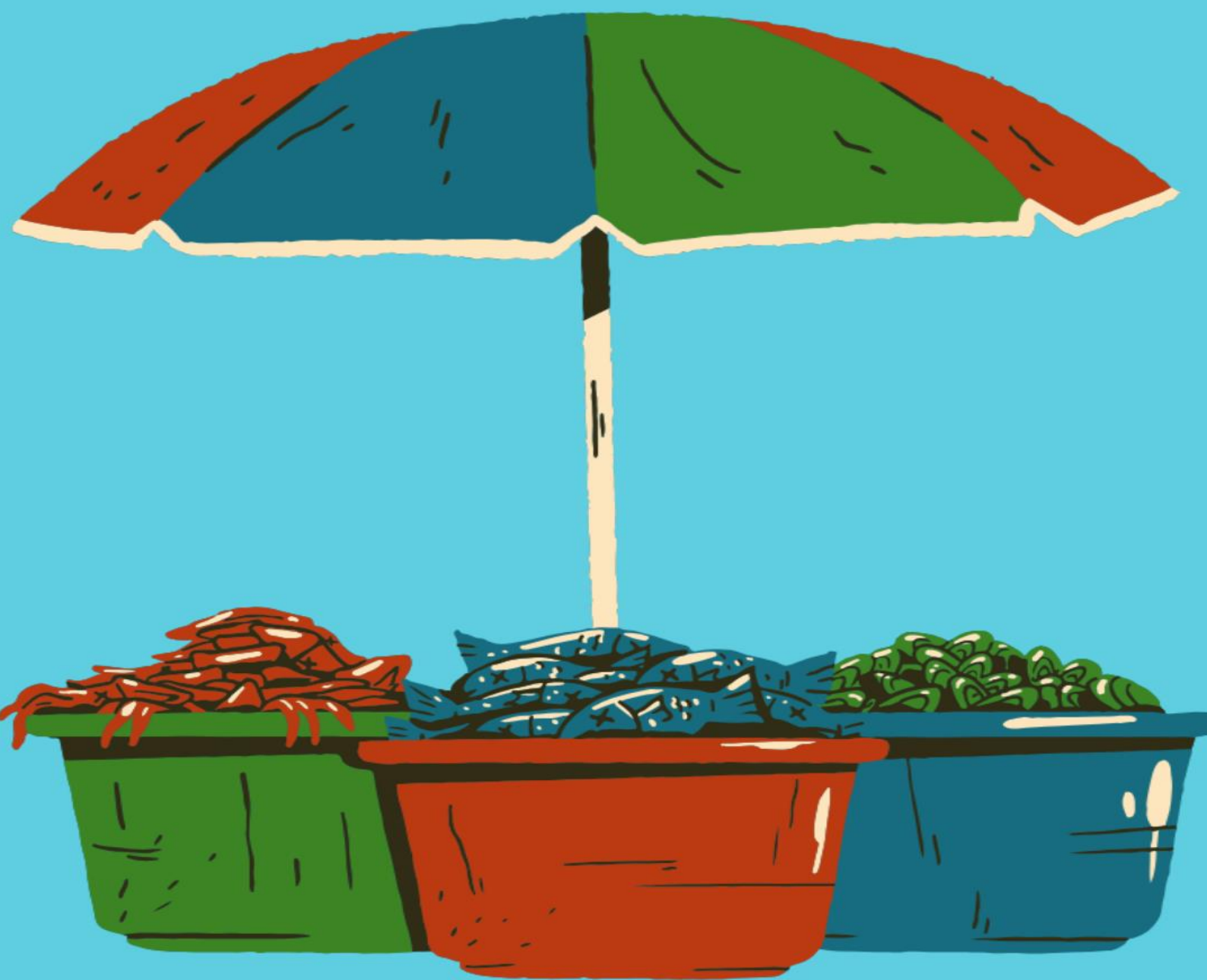
Malili, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS

Drs. ALIMUDDIN NASIR. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 19651231 198603 1 134



Lampiran



Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan

BIDANG PERIKANAN TANGKAP



Pendataan Statistik



Pembangunan Tambatan Perahu



Penyerahan Sarana Alat Tangkap dan Alat Bantu Usaha Perikanan Tangkap



Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan



Sosialisasi Konservasi Wilayah Pesisir



 BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar Terintegrasi Melalui Kolaborasi Ketahanan Pangan



Sosialisasi Pembinaan Perempuan Kelompok Pengikat Rumput Laut Katonik



Pendataan Statistik Bidang Perikanan Budidaya



Jalan Produksi dan Jembatan Tambak Pembudidaya yang dibangun



Tempat Pengikatan Bibit Rumput Laut dan Pagar Balai Benih Ikan



Penyerahan Bantuan Benih Unggul serta Sarana Pembudidaya Ikan

BIDANG DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN



Pendataan Statistik Pengolahan Hasil Perikanan



Sosialisasi Gemar Makan Ikan sebagai Upaya Percepatan Penurunan Stunting



Pembangunan Rumah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Rehab Gudang Rumput Laut



UPTD BALAI BENIH IKAN



Persiapan untuk pemijahan bibit ikan